

 <b>KEMENTERIAN KOORDINATOR          BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN          REPUBLIK INDONESIA</b>	Nomor SOP	OT.01.02-053-055.De.3
	Tanggal Pembuatan	Selasa, 14 November 2017
	Tanggal Revisi	<input type="checkbox"/> Revisi ke .....
	Tanggal Efektif	Rabu, 02 Mei 2018 <input checked="" type="checkbox"/>
	Disahkan oleh	Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM   Jhoni Ginting, S.H., M.H. NIP. 196106121989031003
<b>Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM</b>	<b>Judul SOP Mikro</b>	<b>Pengelolaan administrasi penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Deputi BidKoor Hukum dan HAM</b>
<b>Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM</b>		

<b>Dasar Hukum :</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana :</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menko Polhukam Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenko Polhukam</li> <li>Peraturan Menko Polhukam Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas Kemenko Polhukam</li> <li>Peraturan Menko Polhukam Nomor: Per-02/Menko/Polhukam/7/2012 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Kemenko Polhukam</li> <li>Peraturan Menko Polhukam Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan SOP AP Kemenko Polhukam</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengetahui dan memahami aturan dan praktek dukungan administrasi penyusunan PPU yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang ada</li> <li>Mampu berbahasa indonesia dengan baik dan benar</li> <li>Memiliki inisiatif dan langkah antisipatif</li> <li>Mampu menjaga penampilan</li> <li>Mampu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan baik</li> <li>Mampu mengoperasikan komputer program microsoft office dan internet dengan baik</li> </ol>
<b>Keterkaitan :</b>	<b>Peralatan/perlengkapan :</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>SOP Makro Dukungan Administrasi di lingkungan Deputi BidKoor Hukum dan HAM</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Alat Tulis Kantor (ATK), Filing Kabinet, lemari besi</li> <li>Perangkat komputer (komputer, printer, scanner, laptop)</li> <li>Kendaraan roda dua dan empat</li> <li>Telepon, Faksimile, dsb</li> </ol>
<b>Peringatan :</b>	<b>Pencatatan dan pendataan :</b>
Apabila pengelolaan administrasi penyusunan PPU di lingkungan Deputi tidak sesuai SOP maka hasilnya kurang maksimal	Disimpan dalam data elektronik dan manual

**SOP Mikro Pengelolaan administrasi penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Deputi BidKoor Hukum dan HAM**

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Sesdep	Kabag TU dan Umum	Kasubbag Umum	Pelaksana (JP)	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memberikan arahan kepada Kabag untuk memberikan dukungan/pelayanan teknis administrasi penyusunan PPU di lingkungan Deputi BidKoor Hukum dan HAM sesuai dengan program kerja					Program kerja	5 Menit	Disposisi/arahan Sesdep	
2	Melakukan koordinasi dan konsultasi teknis dengan unit organisasi terkait (Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan) dan memberikan arahan teknis kepada Kasubbag Umum terkait pelaksanaan pemberian layanan dukungan teknis administrasi penyusunan PPU di lingkungan Deputi BidKoor Hukum dan HAM sesuai dengan program kerja					Disposisi/arahan Sesdep	10 Menit	Disposisi/arahan teknis	
3	Pelaksanaan pemberian layanan dukungan teknis administrasi penyusunan PPU di lingkungan Deputi BidKoor Hukum dan HAM					Disposisi/arahan teknis	60 Menit	Layanan teknis administrasi penyusunan PPU	
4	Menyusun konsep laporan pemberian layanan administrasi penyusunan PPU di lingkungan Deputi BidKoor Hukum dan HAM untuk dilaporkan kepada Kabag Tata Usaha dan Umum					Layanan teknis administrasi penyusunan PPU	120 Menit	Konsep laporan pemberian dukungan administrasi penyusunan PPU	
5	Memeriksa konsep laporan pemberian layanan administrasi penyusunan PPU di lingkungan Deputi BidKoor Hukum dan HAM untuk disampaikan kepada Sesdep					Konsep laporan pemberian dukungan administrasi penyusunan PPU	20 Menit	Konsep laporan pemberian dukungan administrasi kehumasan yang telah diperiksa	
6	Memeriksa dan menandatangani laporan pemberian layanan administrasi penyusunan PPU di lingkungan Deputi BidKoor Hukum dan HAM, dan dijadikan bahan evaluasi pelaksanaan dukungan teknis administrasi penyusunan PPU di lingkungan Deputi BidKoor Hukum dan HAM					Konsep laporan pemberian dukungan administrasi kehumasan yang telah diperiksa	10 Menit	Hasil laporan pemberian dukungan administrasi penyusunan PPU	